

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara yang mencakup tiga hal mendasar yaitu : 1) lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir 2) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan 3) standar hidup yang diukur dengan konsumsi perkapita . nilai indeks pembangunan manusia berkisar antara 0-100. Indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, menengah dan ke jenjang perguruan tinggi), dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/penghasilan/PPP). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang untuk menilai kemajuan manusia serta serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indikator indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik tercermin melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index (PPP). Indeks pembangunan manusia mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standard hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran perkapita (BPS,2007).

2.2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau purchasing power parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang dikenal dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standard hidup layak, data PDRB perkapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang kemudian disesuaikan. Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran perkapita setahun yang

disesuaikan, selanjutnya dilakukan perhitungan indeks pendapatan. Indeks pendapatan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat, oleh karena itu semakin tinggi indeks pendapatan maka semakin tinggi daya beli perkapita penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli secara implisit menunjukkan kenaikan kesejahteraan melalui kenaikan pendapatan dan stabilitas harga, sehingga pada akhirnya mutu pembangunan manusia meningkat. Konsep tersebut lebih mengasumsikan bahwa kenaikan indeks daya beli atau kenaikan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sejalan dengan kenaikan pendapatan absolut dan pendapatan riil. Meskipun demikian, suatu hal yang ekstrim bisa saja terjadi, dimana kenaikan pengeluaran riil perkapita lebih disebabkan oleh insentif stabilisasi inflasi, sehingga kemungkinan kenaikan pendapatan absolut sebenarnya riil tidak terjadi (Maqin,2007)

Merujuk pada ketiga indikator indeks pembangunan manusia, maka angka indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS, 2004):

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Ket: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPD (Indeks Pendidikan)

IHH (Indeks Harapan Hidup)

IP (Indeks Pendapatan/Daya Beli)

Tabel 2.1 : Kriteria Pemeringkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Kategori
>50	Rendah
50-66	Menengah bawah
66-80	Menengah atas
>80	Tinggi

Sumber : <https://bps.go.id/22/02/18>

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (dareah). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi penduduk bertambah. Dalam tingkat negara seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri diukur secara agregat dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perubahan peningkatan (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perubahan peningkatan PDB riil pada periode tertentu. Pada tingkat rumah tangga ataupun individu pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari peningkatan pendapatan rumah tangga atau pendapatan perkapita (Todaro dan Smith,2006)

Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu :

- 1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- 2) pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- 3) Teknologi

Menurut Sukirno (2006) beberapa faktor penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya
- 2) jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja
- 3) barang-barang modal dan tingkat teknologi
- 4) sistem ekonomi dan sikap masyarakat

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Faktor teknologi yang sifatnya dinamis dan ditentukan oleh mutu modal manusia. Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal fisik (kapital) saja, tetapi juga dari produktivitas tenaga kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal manusia (Sukirno, 2006).

2.4. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dari masa ke masa, beberapa teori-teori pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Yang menyatakan teori pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu : Jumlah Penduduk, Persediaan barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada penambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi adalah tetap (Alam, 2007).

2. Teori Pertumbuhan Neo-klasik

Model pertumbuhan ekonomi Neo-klasik merupakan salah satu model pertumbuhan yang banyak menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara dan salah satu kontributor utamanya adalah Robert Solow (Todaro dan Smith, 2006). Asumsi yang melandasi teori ini yaitu:

- (1) tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu
- (2) adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode
- (3) adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi tertentu dari output.
- (4) semua tabungan masyarakat di investasikan sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka output disisakan sejumlah proporsi untuk menabung dan kemudian di investasikan, dengan begitu maka terjadi penambahan stok kapital (Tarigan,2004:50).

2.5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Sadono Sukirno, 2000). Dalam APBN pengeluaran pemerintah dapat di kelompokkan dalam dua golongan yaitu sebagai berikut :

1) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan dan pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari meliputi belanja pegawai, yaitu untuk pembiayaan gaji pegawai dan tunjangan. belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain.

Pengeluaran Rutin pemerintah memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

2) Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik dan non fisik. Contoh Pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dan yang dimobilisasi yang kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan.

Pengeluaran pemerintah menunjukkan perannya dalam meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Adapun pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

- a. Peran Alokatif yakni, peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi
- b. Peran distributif yakni, peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan kerja, dan hasil-hasil ekonomi secara adil.
- c. peran stabilitatif yakni, peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dimana pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

d. peran dinamisatif yakni, peran pemerintah dalam menegakkan proses pemabangunan ekonomi agar mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang cepat.

2.6. Teori-teori Pengeluaran

Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun teori pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan teori makro, yaitu sebagai berikut :

1) Pengeluaran pemerintah secara mikro

Teori Mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan uang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Faktor faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah :

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik
- c. Perubahan kualitas barang publik
- d. Perubahan harga faktor-faktor produksi

2) Pengeluaran Pemerintah secara Makro

Adapun beberapa teori-teori pengeluaran pemerintah secara makro, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keynes

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y=C+I+G+(X-M)$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi, (G) merupakan pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes, dengan membandingkan nilai (G) terhadap (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

b. Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka mengenai pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap-tahap pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal, persentase pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

Di tahap menengah, peran investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Di tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari

penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial seperti program kesejahteraan di hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

2.7. Teori Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Demikian pula halnya dengan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan yang tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia sebagai pelaku dari pembangunan juga menjadi sasaran pemabangunan (Putera: 2015).

Dalam undang-undang no 23 tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat ataupun daerah harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk didalamnya anggaran gaji dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Putera,2015).

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. pemerintah melakukan pengeluaran atau yang ditujukan

untuk pembangunan manusia. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia (Putera, 2015). Pengeluaran pemerintah sangat berhubungan dengan indeks pembangunan manusia artinya, semakin besar peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka secara otomatis indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

2.8. Teori Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dipengaruhi oleh 2 jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga, mencakup rumah tangga serta berbagai organisasi kemasyarakatan, serta belanja dan kebijakan pemerintah. Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996).

Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perubahan tingkat harga, tingkat pendidikan serta kesehatan. Tingkat pendapatan dapat digambarkan melalui PDRB perkapita. Ketika tingkat pendapatan rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, akan menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya,

tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia (Ananta, 2013).

Pertumbuhan ekonomi memeberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin (Ranis, 2004). Dengan kata lain, peningkatan pendapatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk (Sen, 1999).

2.9. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka peneliti mengambil contoh penelitian sebelumnya :

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Aswanto	2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau tahun 2009-2013	Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 7 dengan metode Panel Least Square yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat sedangkan pengeluaran pemerintah sebagai variabel bebas selama tahun 2009 hingga 2013 yang hasil analisis nya yaitu bahwa pengeruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	M. Alyuriza Syalkafi	2016	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan	Variabel pertumbuhan ekonomi variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan secara

			pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung pada tahun 1999-2014	bersama-sama berpengaruh positive dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia.
3.	Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto	2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di sektor pendidikan dan Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Kutai timur	Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kutai timur sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kutai timur.

2.10. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru
2. Diduga pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru.
3. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru.